
PENYELENGARAAN - PERLINDUNGAN - POHON

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 39,

Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon

- ABSTRAK:
- Perlindungan dan pelestarian pohon menjadi isu penting dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Keberadaan pohon yang vital ini memerlukan perlindungan yang memadai. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2021, yang awalnya mengatur hal ini, kini dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan terkini sehingga memerlukan pembaruan. Selaras dengan Pasal 14 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati baru yang mengatur penyelenggaraan perlindungan pohon di Kabupaten Gresik.
 - UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;UU Nomor 20 Tahun 2023;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2007;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010;
 - Penelitian ini membahas mengenai pengaturan penyelenggaraan perlindungan pohon yang diatur dalam peraturan daerah. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup, serta mencegah dan membatasi kerusakan pada pohon yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbuatan manusia, daya alam, hama, dan penyakit. Penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pemeliharaan, pendataan, dan pengendalian pohon. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melalui penanaman, pemeliharaan pohon, serta melaporkan setiap kejadian yang dapat membahayakan pohon. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat dalam upaya perlindungan pohon untuk menciptakan kenyamanan, keselamatan, dan meningkatkan estetika kota.

- CATATAN:
- Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024
 - Status Peraturan bupati gresik Berlaku